

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Anwar, Yesmil dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Widya Padjajaran. Bandung.
- Basuki, Sulistyono. 2006. *Metode penelitian*. Wadatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jakarta.
- Chazawi, Adam. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada. Yogyakarta.
- _____. 2003. *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Bayumedia. Malang.
- Danil, H. Elwi. Cetakan kedua 2014, *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka*. Jakarta.
- Hartanti Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Fahrojih, Ikhwan. 2016. *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Setara Press. Malang.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penulisan Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamzah, Andi. 1993. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- _____. 2009. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, Yahya. 1998. *Pemecahan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- _____. Edisi Kedua 2017. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Cv. Alfabeta. Bandung.
- Kartonegoro. Tanpa Tahun. *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektor Mahasiswa. Jakarta.
- Krisnawati, Dani, Dkk. 2006. *Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus*. Jakarta Selatan. Pena Pundi Aksara.



- Klitgaard, Robert. (alih bahasa oleh Masri Maris). 2005. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*. Jakarta. Yayasan Obor Indonesia.
- PA. Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Yogyakarta.
- Marpaung, Leden. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Moeljatno. 1985. *Hukum Pidana Delik-Delik Percobaan Delik-Delik Penyertaan*. Bina Aksara. Jakarta.
- _____. 1987. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Mutiara, Dahlia. 1962. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Nurdjana, IGM. 2009. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematisasi Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Total Media. Yogyakarta.
- O.S Hiariej, Eddy. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Pemecahan Perkara Pidana (splitsing)*. Liberty. Yogyakarta.
- _____. 1988. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana, dan Eksaminasi Perkara di dalam Proses Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- Priyono, Henry. 2018. *Korupsi Melacak Arti, Menyimak Implikasi*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya. Malang.
- Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Widya Karya. Malang.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. cetakan ketiga. Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.



- Sofyan, Andi dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sunggono, Bambang. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- Yunara, Edi. 2005. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berikut Studi Kasus*. CitraAditya Bakti. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Pidana Umum Nomor B-69-E-02-1997 tentang Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana

C. Karya Ilmiah

- Buana, Muhammad Pandu Fajar. 2016. "Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)". *Karya Ilmiah*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.



- Hilmansyah, Moch. 2015. "Pelaksanaan Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) Sebagai Upaya Mempercepat Proses Pembuktian (Studi di Kejaksaan Negeri Semarang)". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- Hutapea, Josua D. W. 2017. Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. *Artikel*, *Lex Crimen* Vol. VI. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Sulawesi Utara.
- Hidayat, Reza. 2015. Penyertaan dalam Tindak Pidana Korupsi (Telaah terhadap Kelalaian Dalam Penyertaan untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi). *e-Jurnal Katalogi*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Tadulako. hlm. 2.
- Ifrani. 2017. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Ilmiah Al'Adl*. Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.
- Latifah, Marfuatul. 2012. Legalitas Kewenangan Jaksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmiah Negara Hukum* Vol. 3. DPR RI. Jakarta.
- Setyowati, Ike Indra Agus. 2018. Pembantuan dan Penyertaan (Deelneming) dalam Kasus Perkosaan Anak. *Jurnal*. Media Luris Vol. 1. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Satrianto, Fadli. 2015. "Pemisahan Berkas Perkara (Splitsing) dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Hukum Positif". *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.
- Sudarsono, Kurniawan Respati. 2010. "Analisis Konstruksi Hukum Penuntut Umum dalam Menyusun Dakwaan Terhadap Tindak Pidana yang Mengandung Perbarengan dan Implikasi Yuridisnya (Studi Kasus Nomor 22/Pid.B/2009/Pn.Tl Di Pengadilan Negeri Trenggalek)". *Hasil Penelitian*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Putro, Galih Hartanto, Sukinta, dan Bambang Dwi Baskoro. 2012. Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. *Jurnal Diponegoro Law Review* Volume 1 Nomor 4. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Thon, Djefriye. 2016. Kajian Hukum terhadap Ajaran Penyertaan (deelneming) dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU No. 20 Tahun 2001. *Jurnal*. *Lex Privatum* Vol. IV.

D. Internet

- Anonim. 2014. "Praperadilan di Indonesia: Teori, Sejarah, dan Praktiknya". <http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/>. Diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 10.50.



- KBBI. "Arti Kata "saksi" Menurut KBBI". <http://kbbi.co.id/arti-kata/saksi>. diakses pada 17 Februari 2019 pukul 15.10.
- _____. "Arti Pemisahan menurut KBBI", <https://kbbi.kata.web.id/pemisahan/>, diakses pada 06 Maret 2019 pukul 03.19.
- Belarminus, Robertus. "5 Tersangka Kasus E-KTP Ditetapkan KPK, Ini Dugaan Peran Mereka". <https://nasional.kompas.com/read/2017/07/20/05300061/5-tersangka-kasus-e-ktp-ditetapkan-kpk-ini-dugaan-peran-mereka?page=all>, diakses pada 06 Maret 2019 pukul 01.26.
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan Kejaksaan, 2010, "Independensi Kejaksaan dalam Kaitannya dengan Sistem Negara Hukum di Indonesia", https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=1543&bc, diakses pada 06 Maret 2019 pukul 05.40.
- Dylan Aprialdo Rachman. "Kasus DPRD Kota Malang, Korupsi Massal yang Mengkhawatirkan". <https://nasional.kompas.com/read/2018/09/04/08512451/kasus-dprd-kota-malang-korupsi-massal-yang-mengkhawatirkan>. diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 10.47.
- Nursal, Muhammad. 2011. "Proses Peradilan Pidana". <http://www.negarahukum.com/hukum/proses-peradilan-pidana.html>. diakses pada 10 Oktober 2018 pukul 20.45.
- Shenny Fierdha. "Jumlah kasus korupsi di Indonesia meningkat". <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/jumlah-kasus-korupsi-di-indonesia-meningkat/938796>. diakses pada 14 Oktober 2018 pukul 10.37.
- Tobing, Letezia. "Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt519a34bca3574/perbedaan-turut-melakukan-dengan-membantu-melakukan-tindak-pidana>. diakses pada 12 Februari 2019 pukul 20.45.
- _____. 2014. "Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>. diakses pada 17 Februari 2019 pukul 15.22.
- _____. 2014. "Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana". <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5394538dd600b/hak-dan-kewajiban-saksi-dalam-perkara-pidana>. diakses pada 17 Februari 2019 pukul 21.16.
- User, Super. 2017. "Pengadilan Tipikor", <https://acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-46-tahun-2009-pengadilan-tindak-pidana-korupsi>. diakses pada 17 Februari 2019 pukul 21.38.
- Yasin, Muhammad. 2014. "Peradilan yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan". <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan->



yang-sederhana--cepat--dan-biaya-ringan, diakses pada 17 Februari
2019 pukul 21.22.